

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 mengacu pada perencanaan pembangunan nasional dan provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program – program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama – sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing – masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Disamping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Batang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah bagian dari suatu sistem pembangunan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kab.), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Prov.) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang disusun berdasarkan dan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2023 – 2026 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten dalam menjalankan visi jangka menengah daerah.

Penyusunan Renja tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra pada akhirnya Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7).
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2007-2025;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
15. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Batang Nomor 27 Tahun 2022 tentang RKPD Tahun 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan di 2 bidang yaitu Bidang Perumahan dan Pertanahan, Bidang Permukiman yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang. Selain itu Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang, di jajaran fungsional dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan perumahan dan pertanahan, permukiman serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan, terutama yang diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang.

Terciptanya efisiensi dan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang.

1.3.2. Tujuan

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang pada tahun anggaran 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Tahun 2024:

1.1. Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Bagian ini memuat peraturan – peraturan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang

1.3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Memuat review kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Tahun 2022 dan perkiraan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.

1.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini menguraikan tingkat kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap visi/misi, tantangan dan peluang, dan rekomendasi serta catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024

1.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bagian ini menguraikan proses perbandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut

1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat

Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan)

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2013 – 2026 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

3.3. Program dan Kegiatan

Bagian ini menguraikan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

Bab IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja OPD dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala – kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tahun berikutnya. Rencana Kerja suatu SKPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD tersebut. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap

Renja PD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut:

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya;

Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Tahun 2024 juga memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2024;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Tahun 2022, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang mendapatkan Anggaran sebesar Rp.29.603.399.479,00 dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp.28.385.188.220,00 atau 95,88% terdapat efisiensi sebanyak 4,12%.

Realisasi program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang tidak ada yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan karena dalam hal ini realisasinya melebihi 50% tetapi tidak semuanya program kegiatan tersebut mencapai realisasi 100%, hanya beberapa kegiatan dari program yg realisasinya mencapai 100% pada tahun anggaran 2022.

Program/kegiatan di atas meliputi:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (95,16%)
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (78,49%)
3. Penyediaan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (98,14%)
4. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (99,75%)

2) Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (99,91%)
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor(98,47%)
3. Penyediaan bahan logistik kantor (99,83%)
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (81,23%)
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (52,00%)
6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (98,70%)

3) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (98,74%)
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (98,14%)

4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (77,52%)
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi atau gedung kantor bangunan lainnya (100%)
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor bangunan lainnya (65,79%)

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (93,11%)
2. Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (99,59%)
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (97,82%)
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (98,10%)

6) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan pakaian kerja lapangan (87,03%)

7) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (100%)

B. Program Kawasan Permukiman

1) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (99,66%)

2) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

1. Perbaikan Rumah Tidak layak Huni (99,63%)

C. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan utilitas Umum (PSU)

- 1) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 1. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (98,14%)
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (99,96%)
- D. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM(92,55%)
 2. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (92,46%)
 3. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM (72,54%)
- E. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (94,92%)
 2. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman (99,99%)
- F. Program Pengembangan Permukiman
 - 1) Penyelenggaraan Infrastruktur padaPermukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kotaik (92,44%)
 - 2) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (89,49%)
- F. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
 - 1) Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (99,47%)
2. Program/kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang yang realisasinya mencapai 100%

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, 5 laporan terealisasi dengan tingkat capaian sebesar 100%
 - 2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, terealisasinya 3 gedung dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Tabel T-C.29/Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan
Kabupaten Batang

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelayanan terhadap masyarakat meningkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Keg Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya Kegiatan surat menyurat di DPRKP	1,000 surat	1,000 surat	5,000 surat	5,000 surat	100%	1,000 surat	1,000 surat	100%

	Sub Keg Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Adanya telepon, listrik dan air di DPRKP	12 bln	12 bln	60 bulan	60 bulan	100%	12 bln	12 bln	100%
	Sub Keg Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kerja	Terawatnya peralatan kantor DPRKP Kabupaten Batang	12 bln	12 bln	60 bulan	60 bulan	100%	12 bln	12 bln	100%
	Sub Keg Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bersih dan Nyamannya kantor DPRKP	12 bln	12 bln	60 bulan	60 bulan	100%	12 bln	12 bln	100%
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercukupinya kebutuhan administrasi kantor DPRKP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Keg Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Adanya jaringan Listrik di DPRKP	12 bln	12 bln	60 bulan	60 bulan	100%	12 bln	12 bln	100%
	Sub Keg Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Lancarnya administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	60 bulan	60 bulan	100%	12 bln	12 bln	100%
	Sub Keg Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor dan makan minum kantor	12 bln	12 bln	60 bulan	60 bulan	100%	12 bln	12 bln	100%
	Sub Keg Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetak dan penggandaan	12 bln	12 bln	60 bulan	60 bulan	100%	12 bln	12 bln	100%
	Sub Keg Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bertambahnya wawasan karyawan	12 bln	12 bln	60 bulan	60 bulan	100%	12 bln	12 bln	100%
	Sub Keg Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bln	12 bln	60 bulan	60 bulan	100%	12 bln	12 bln	100%
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji PNS dan honor pengelola keu & Satpam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Keg Penyediaan Gaji	Meningkatkan kinerja PNS	12 bln	12	60	60	100%	12 bln	12 bln	100%

	dan Tunjangan ASN				bulan	bulan				
	Sub Keg Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium petugas pengelola keu & Satpam	12 bln	12	60 bulan	60 bulan	100%	12 bln	12 bln	100%
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya kegiatan kantor DPRKP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan	31 kend	12	60 bulan	60 bulan	100%	31 kend	31 kend	100%
	Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi atau gedung kantor bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor DPRKP	1 gedung	1	5 gedung	5 gedung	100%	1 gedung	1 gedung	100%
	Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor bangunan lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	6 buah	1	5 buah	5 buah	100%	6 buah	6 buah	100%
	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya kegiatan kantor DPRKP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Keg Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 buah					1 buah	1 buah	
	Sub Keg Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tercukupinya Sarana prasarana gedung kantor	1 buah	1	5 buah	5 buah	100%	1 buah	1 buah	100%

	Sub Keg Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Adanya pengadaan peralatan gedung kantor	3 buah	1	5 buah	5 buah	100%	3 buah	3 buah	100%
	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya pakaian dinas dan ASN yang mengikuti diklat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Keg Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	37 stel	37 stel	200 stel	200 stel	100%	37 stel	37 stel	100%
	Sub Keg Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	37orang	37 stel	200 stel	200 stel	100%	37orang	37orang	100%
	Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang tersusun	5 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	100%
B	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani	62,50%					62,50%	62,50%	100%
	Keg. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh yang tertangani	68,36%	100%	100%	100%	100%	68,36%	68,36%	100%
	Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan	Jumlah luas kawasan kumuh yang tertangani	68,36%				100%	68,36%	68,36%	100%

	Permukiman Kumuh									
	Keg. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Prosentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	20%	100%	100%	100%	100%	20%	20%	100%
	Sub Keg Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	BOP Kegiatan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (Pendampingan Bantuan Perumahan Swadaya dari Kemenpera)	1000 unit	2826	14128	14128	100%	1000 unit	1000 unit	100%
C	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	78%					78%	78%	100%
	Keg.Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase kualitas sarana prasarana infrastruktur yang tertangani	78%	100%	100%	100%	100%	78%	78%	100%
	Sub Keg.Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah luas taman dalam keadaan baik	70%	5	25	25	100%	70%	70%	100%
		Jumlah Luas TPU dalam keadaan baik	10%					10%	10%	100%
	Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Rekomendasi Rencana Tapak Perumahan yang diterbitkan	25 buah	5	5	5	100%	25 buah	25 buah	100%

D	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase RLH bagi korban bencana / terdampak program pemerintah	100%					100%	100%	100%
	Keg. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani	100%					100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang direhab	100%					100%	100%	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM									
	Keg. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penyediaan air minum /air bersih		100%	100%	100%	100%			
	Sub Keg. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Terencananya pembangunan jaringan air bersih/air minum		1 paket	7 paket	7 paket	100%			
	Sub Keg. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pendampingan Program SANIMAS. Cakupan layanan akses air minum program pendampingan		12	60	60	100%			
	Sub Keg. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Tersedianya Sarana sanitasi dasar sesuai standar (SNI). Jumlah jiwa terlayani air minum yang pengelolaannya berbasis masyarakat		12	60	60	100%			

	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH									
	Keg. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam daerah kabupaten/kota	Prosentase air limbah/ sanitasi yang tertangani		100%	100%	100%	100%			
	Sub Keg. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pendampingan Sarana Sanitasi dasar sesuai standart (SNI), Pembangunan Tanki Septi (Hibah Air Limbah Setempat)		5	25	25	100%			
	Sub Keg. Pembangunan /Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kesehatan masyarakat meningkat. Cakupan layanan ail limbah/ sanitasi		5	25	25	100%			
E	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Fasilitas Hak Atas Tanah Program Daerah dan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	75%					75%	75%	100%
	Keg. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah permasalahan yang difasilitasi	75%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	Jumlah permasalahan yang difasilitasi	75%	65%	65%	65%	100%	75%	75%	100%

	Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2023

Untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2023 dengan usulan sebesar Rp. 15.607.460.027,00 terurai dalam 5 program ,12 kegiatan, 27 sub kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2022, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik kegiatan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Batang, pada dasarnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang melekat guna mewujudkan Good Government di era otonomi daerah dimana mengharuskan kita untuk dapat merespon berbagai tuntutan dinamika global yang berubah sangat cepat dan sarat kompetitif, telah mempunyai konsep perencanaan yang komprehensif dan implemtatif yang akan dijadikan panduan (guidance) dalam melaksanakan pembangunan, bersinergi dan berintegrasi antara sektor /sub sektor.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPRKP sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah rumah tidak layak huni yang harus ditangani
2. Masih banyaknya luasan kumuh yang belum tertangani;
3. Kurangnya pendukung sarana dan prasarana dalam penataan taman
4. Belum tersusunnya Perda Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Belum tersusunnya Data Base Perumahan

Perlunya identifikasi daerah rawan bencana/relokasi program pemerintah. Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang maka strategi dan kebijakan, sesuai dengan Misi 3 Kabupaten Batang, yang akan ditempuh DPRKP Kabupaten Batang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan, pembinaan dan pengendalian perumahan serta pertanahan secara berkelanjutan
2. Penyehatan lingkungan dan pengembangan kawasan, penataan infrastruktur dan sarana prasarana permukiman serta pertamanan dan permukiman

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Prov. Jawa Tengah sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan Cukup Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dalam tahun 2022 sebesar 95,88%
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang menggunakan dana kurang dari dana yang dianggarkan. Hal ini berarti terjadi efisiensi 4,12% dari anggaran yang disediakan.

Capaian kinerja organisasi juga diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Capaian kinerja pelayanan DPRKP Kabupaten Batang tahun 2022 dapat diketahui dari indikator-indikator dibawah ini :

1. Meningkatnya rumah sehat dan rehabilitasi rumah tidak layak huni, dengan tercapainya presentase dari jumlah target sebesar 81% dan realisasi 80% dengan tingkat capaian 79,95%
Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya karena setiap tahun jumlah rumah tidak layak huni tidak pernah habis dan malah bertambah. Langkah yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja mengusulkan tambahan anggaran dana APBD Kab, APBD Provinsi maupun dana pusat DAK.
2. Meningkatnya pengurangan luasan kawasan kumuh, dengan tercapainya presentase dari jumlah target sebesar 90% dan realisasi 75,78% dengan tingkat capaian 75,99%
Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya karena jumlah kawasan kumuh tidak berkurang, banyak luasan kumuh ygang belum tertangani. Langkah penanganannya adalah dengan meminimalisir jumlah luasan kawasan kumuh, mensosialisasikan akan pentingnya kebersihan dan mengusulkan tambahan anggaran.
3. Meningkatnya infrastruktur lingkungan perumahan yang layak, dengan tercapainya presentase dari jumlah target sebesar 75% dan realisasi 80% dengan tingkat capaian 66,09%
Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya karena jumlah panjang jalan dan drainase belum terdata dan anggaran kegiatan infrastruktur hanya bersumber dari usulan/aspirasi dewan. Langkah penanganannya adalah dengan mengusulkan tambahan anggaran.

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Batang.

Susunan Kepegawaian dan Sarpras

a. Susunan Kepegawaian :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang terdiri dari :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretaris membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian
- III. Bidang Perumahan dan Pertanahan membawahi Seksi Pertanahan
- IV. Bidang Permukiman
- V. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- VI. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
2. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
6. Pengelolaan teknis perizinan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
7. Pelaksanaan pelayanan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dengan mengacu pada Standart Pelayanan Minimal bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
8. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
10. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Tabel T-C.30 / Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Batang

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun n-2 2022	Tahun n-1 2023	Tahun n 2024	Tahun n+1 2025	Tahun n-2 2022	Tahun n-1 2023	Tahun n 2024	Tahun n+1 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman											
1	Cakupan layanan akses sanitasi lingkungan perumahan	-	Rumah tangga per sanitasi	86%				80,77%				
2	Persentase Pengurangan pemukiman kumuh	-	Jumlah lingkungan kumuh yang tertangani	85%	62,50%	63,00%	63,50%	75,99%	75,99%	63,00%	63,50%	
3	Cakupan layanan akses air minum perumahan	-	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	88%				86,49%				
4	Persentase pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak	-	Jumlah Infrastruktur yang dipenuhi	80%	61%	63%	65%	66,09%	66,09	63%	65%	
5	Rumah layak huni	-	Jumlah rumah layak huni	81%	62,50%	63,00%	63,50%	79,95%	79,97%	63,00%	63,50%	
6	Prosentase perumahan dan lingkungan permukiman yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik	-	Jumlah perumahan dan permukiman yang diengkapi PSU dalam kondisi baik	10%	78%	81%	84%	9,12%	69,38%	81%	84%	
7	Prosentase rumah sehat	-	Jumlah rumah sehat	81%				79,95%				
	Pertanahan											
1	Persentase penyelesaian kasus pertanahan	-		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
2	Tingkat penurunan kasus sengketa pertanahan			35%	80%	85%	90%	35%		85%	90%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

A. Identifikasi Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang ada dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bidang Permukiman:

a. Permasalahan :

1. Belum tersedianya jalan lingkungan dan drainase dengan baik..
2. Minimnya jumlah SDM/tenaga teknis DPRKP Kabupaten Batang.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan drainase.
4. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman
5. Kualitas Infrastruktur PSU Perumahan sulit diukur

b. Solusi :

1. Penataan dan peningkatan drainase yang baik sehingga air tidak menggenang di jalan.
2. Perbaiki jalan lingkungan sehingga pengguna jalan menjadi aman dan nyaman.
3. Menambah tenaga teknis/SDM dengan pengangkatan khusus/sistem kontrak.
4. Menumbuhkan kesadaran masyarakat pengguna jalan dengan sosialisasi dan sanksi yang tegas.
5. Menambah anggaran untuk pemeliharaan baik taman dan jalan agar kerusakan segera tertangani dan tidak bertambah parah.

2. Bidang Perumahan dan Pertanahan :

a. Permasalahan :

1. Belum terbentuknya Perda Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani.
3. Belum adanya data base perumahan
4. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau
5. Meningkatkan luasan kawasan kumuh
6. Rasio Rumah Layak Huni masih jauh dari target
7. Indikator kinerja pertanahan tidak mudah diterapkan

b. Solusi :

1. Menambah anggaran untuk pemutakhiran data base perumahan agar valid .
2. Penanganan rumah tidak layak huni dengan menambah anggaran perbaikan RTLH
3. Menambah tenaga teknis yang kompeten dan sarana prasarana yang diperlukan.
4. Dilakukan identifikasi peta rawan bencana dan Kawasan kumuh.
5. Indikator kinerja pertanahan tidak mudah diterapkan.
6. Perlunya sosialisasi rumah sehat dan layak huni.
7. Sertifikat tanah menjadi kewenangan BPN, fasilitasi sengketa tanah juga merupakan fusi di BPN sulit mendapatkan data dari BPN

B. Perumusan Isu Strategis

Dengan melihat identifikasi masalah baik permasalahan (kekuatan dan kelemahan) dan solusi (peluang dan tantangan) yang ada di Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang, maka isu strategis yang muncul sebagai berikut

1. Rasio rumah layak huni yang masih rendah.
2. Masih terdapatnya kawasan kumuh yang belum tertangani
3. Belum terbentuknya perda perumahan dan kawasan permukiman
4. Kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
5. Fasilitasi Permasalahan Pertanahan
6. Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum di Perumahan

C. Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Bapelitbang terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Batang dan Terhadap Capaian Program Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Batang masih mengacu pada tahun 2017-2022, bahwa Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Batang adalah:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BATANG YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AGAMIS, TENTERAM DAN SEJAHTERA”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Batang yang Harmonis
Batang yang Harmonis memiliki arti pemerintahan berjalan selaras dengan aspirasi masyarakat (aspiratif); Penguatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana pegawai yang ada sebagai aset daerah yang harus dikembangkan dan didayagunakan; Pembangunan Batang yang menjaga keselarasan dan sinergitas dengan pembangunan nasional dan pembangunan provinsi Jawa Tengah; Penguatan kerjasama (pusat dan antar daerah) serta dengan seluruh stakeholders dalam membangun Batang bersama sama.
2. Batang yang Energik
Batang yang Energik memiliki arti fokus pada pembangunan manusia Batang seutuhnya, ketersediaan layanan kesehatan prima dan paripurna, pelayanan pendidikan dasar, Pengembangan pendidikan vokasi berbasis potensi lokal Batang, serta stimulus bagi masyarakat untuk mengolah seluruh potensi yang ada sehingga bernilai ekonomi tinggi dan lestari agar dapat mengangkat taraf hidup masyarakat.
3. Batang yang Berdaya Saing
Batang yang Berdaya Saing artinya Batang yang terus tumbuh dan berkembang mengungguli daerah lain, Batang yang Pro Investasi serta integrasi pengembangan agrobisnis lestari dan pariwisata (edu tourims and religi tourism) dengan tetap menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.
4. Batang yang Agamis
Batang yang Agamis artinya masyarakat Batang yang taat mengamalkan ajaran agamanya masing-masing, dimana pemerintah daerah menjamin kebebasan seluruh masyarakat untuk menjalankan peribadatan sesuai dengan agamanya dengan tertib

dimana pemerintah daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pengalaman keagamaan secara proporsional.

5. Batang yang Tenteram

Batang yang Tenteram artinya kehidupan masyarakat Batang yang damai, aman tenteram dan sentosa, serta terciptanya kerukunan seluruh masyarakat dimana kriminalitas yang terus turun; Pengembangan sistem manajemen bencana daerah secara terpadu sebagai mekanisme early warning sistem penanggulangan bencana.

6. Batang yang Sejahtera

Batang yang Sejahtera sebagai ultimate goal dari berbagai aspek pembangunan yang ada, yang artinya masyarakat Batang yang sejahtera lahir batin dimana *income per capita*, daya beli keluarga (atas sandang, pangan dan papan) masyarakat mengalami peningkatan, serta terpenuhinya hak atas pendidikan, terpenuhinya hak atas kesehatan dan terfasilitasinya kebutuhan aktualisasi diri setiap masyarakat Batang.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 4 (empat) Misi sesuai Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang 2017-2022 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis *Smart City* yang didukung pengembangan kerjasama.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu.
3. Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
4. Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengalaman ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan pembangunan bidang Perumahan dan Permukiman dan membantu Bupati Batang dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat mewujudkan pembangunan di bidang Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Batang. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan Renstra 2023-2026

Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang 2023-2026 adalah “Terwujudnya sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang layak guna peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam menunjang pembangunan”.

Sehubungan dengan hal tersebut maka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang sebagai pelaksana fungsi penunjang pemerintahan bidang perumahan, permukiman dan pertanahan

berperan besar dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Batang.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Batang yang ingin dicapai tahun 2024 adalah Penguatan sistem kesehatan, perlindungan sosial dan percepatan pemulihan ekonomi serta perwujudan kondusifitas wilayah menuju masyarakat Batang yang Agamis dan Tenteram. Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang dalam perencanaan pembangunan tahun 2024 adalah mengawal program/kegiatan pada SKPD agar fokus memberikan kontribusi peningkatan kinerja dan kualitas berdasarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan (Money Follow Program).

D. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang kurun waktu lima tahun kedepan perlu mengetahui seperti apa dinamika tantangan dan peluang yang ada guna mempertajam kebijakan pelayanan bidang perumahan dan permukiman untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD Kabupaten Batang. Keberhasilan atau kegagalan perencanaan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan internal maupun eksternal penting untuk dilakukan.

Analisis terhadap lingkungan internal meliputi analisis kekuatan dan kelemahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu:

Kekuatan (Strength)

1. Adanya kewenangan tugas pokok dan fungsi Dinas berdasarkan Perda dan Peraturan Bupati
2. Adanya SDM/aparat di bidang Teknik;
3. Adanya sarana prasarana penunjang pelayanan
4. Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang

Kelemahan (Weakness)

1. SDM/aparat di bidang Teknik terbatas;
2. Belum efektifnya sosialisasi di Bidang Perumahan dan Permukiman
3. Tingkat profesionalisme aparat kurang memuaskan dalam pelayanan
4. Belum adanya data base perumahan dan kawasan kumuh
5. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan terbatas/minim
6. Terbatasnya anggaran yang tersedia

Tantangan / Ancaman (Threat)

1. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan;

3. Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparat DPRKP;
4. Belum optimalnya penerapan sistem administrasi;
5. Data base perumahan dan permukiman yang kurang valid dan mutakhir;
5. Kurangnya insiatif kinerja aparat pelaksana.
6. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani;
7. Belum tersusunya Perda Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Meningkatnya luasan kawasan permukiman kumuh

Peluang (Opportunity)

1. Adanya Undang-undang dan Peraturan-peraturan di Bidang Perumahan dan Permukiman yang menunjang pelaksanaan program dan kegiatan, diantaranya yaitu:
 - UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman yang bertujuan menata dan mengelola perumahan dan permukiman, baik di daerah perkotaan dan perdesaan mulai dari perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian termasuk didalamnya pengembangan, kelembagaan, pendanaan dan system pembiayaan serta peran masyarakat yang terkoordinasi.
 - UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, yang diwujudkan dengan adanya: (i) keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (ii) keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta; (iii) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
 - PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) bertujuan sebagai pedoman dalam: (i) penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional; (ii) penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; (iii) pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional; (iv) perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor; (v) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; (vi) penataan ruang kawasan strategis nasional, dan; (vii) penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 yang bertujuan untuk melaksanakan:
 - i. Perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan system pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu
 - ii. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan system yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasapermukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahandanpeningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaantanah, pendanaandan sistem pembiayaan, sertaperan masyarakat.

- iii. Permen PU No. 494/PRT/M/2005 tentang KSNP-Kota yang bertujuan sebagai pedoman untuk penyiapan pengaturan dan rencana pengembangan perkotaan baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan kondisi dan potensi setempat.
2. Jangkauan wilayah kerja yang luas mencakup seluruh kecamatan dan desa;
3. Banyaknya Program Nasional yang mendukung Program Pembangunan di Kota/Kabupaten.
4. Makin besarnya kewenangan daerah untuk mengembangkan program pengembangan perumahan
5. Meningkatnya kerjasama antar sektor antar daerah dan antar lembaga dalam penanganan masalah perumahan dan kawasan permukiman;
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan kekritisian serta peran serta masyarakat terhadap pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
7. Jumlah asosiasi dan pengusaha jasa konstruksi bertambah, persaingan menjadi kompetitif;
8. Tersedianya perangkat lunak pendukung pelaksanaan kegiatan;
9. Tersedianya bahan/material di pasaran dalam jumlah yang cukup;
10. Adanya dukungan semua pihak untuk keberhasilan kegiatan;
11. Tuntutan untuk selalu meningkatkan kinerja pelayanan publik;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD dan RKPD.

Guna menghasilkan suatu rencana kerja PD yang selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu telaahan (*review*) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten BatangTahun 2024. Adapun review rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) pada DPRKP Kabupaten Batang sebagai berikut:

- ✓ Program yang masuk Renstra dan masuk kedalam RKPD sebanyak: 5 Program
- ✓ Kegiatan yang masuk Renstra dan masuk kedalam RKPD sebanyak: 12 Kegiatan
- ✓ Sub Kegiatan yang masuk Renstra dan masuk kedalam RKPD sebanyak : 27 Sub Kegiatan

Sesuai dengan Tabel 2.4 bahwa rancangan awal RKPD dan Hasil analisis kebutuhan mengalami perbedaan yaitu rancangan awal RKPD pagu anggaranya lebih besar daripada hasil analisa kebutuhan adapun yang melatar belakangi hal tersebut diantaranya :

1. Pada waktu penyusunan rancangan awal RKPD semua usulan baik usulan musrenbangcam, usulan akselerasi, usulan aspirasi dewan, usulan usulan OPD dan Usulan Prioritas bupati dimasukkan semuanya tanpa memperhatikan kemampuan APBD Kab Batang selanjutnya dengan berkembangnya waktu berdasar dari kemampuan APBD Kabupaten Batang sehingga dirubah usulan rancangan awal RKPD di potong sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Batang.
2. Diharapkan usulan dari masing-masing Kecamatan mengusulkan berdasarkan usulan skala prioritas mengingat anggaran APBD Kabupaten Batang Terbatas.

Tabel T-C.31 /Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Batang

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang

N O	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat ata n Pe nti ng
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				16.170.250.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				17,737,760,027	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase capaian kinerja anggaran program perangkat daerah	12 Bulan	4.716.159.500	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase capaian kinerja anggaran program perangkat daerah	12 Bulan	4.200.072.947	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	5 Laporan	6.029.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Batang	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	6,000,000	

								yang disusun			
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	6.029.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	6,000,000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan laporan keuangan yang disusun	12 Bulan	3.858.744.750	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan laporan keuangan yang disusun		3.626.909.307	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan 38 orang	3.549.336.250	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	3.378.501.897	
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	309.408.500	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	248.407.500	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya pakaian dinas dan ASN yang mengikuti diklat	1 Tahun	91.845.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Batang			41.000.000	

4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1 paket	16.845.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	37stel	16.000.000	
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37 Orang	75.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	37 Orang	25.000.000	
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yg dilaksanakan	12 Bulan	179.180.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Batang			155.758.500	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 paket	14.300.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	14.300.000	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	29.155.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	29.155.500	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	33.975.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	27.795.000	
9	Penyediaan Barang	Semua	Jumlah Paket Barang	1 paket	10.500.000,	Penyediaan Barang Cetak	Semua	Jumlah Paket Barang	12 Bulan	10.500.000	

	Cetakan dan Penggandaan	Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cetakan dan Penggandaan yang disediakan			dan Penggandaan	Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	0 Paket		
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	4 dokumen	6,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Bulan	6,000,000	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	85.250.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	68,008,000	
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan pengadaan barang milik daerah	12 Bulan	220.493.600	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			66.791.000	
12	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	80.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	56.000.000	
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Saranadan Prasarana GedungKantor atau BangunanLainnya	1 unit	53.348.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.541.000	
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Semua Kab/Kota,	Jumlah Pengadaan Saranadan Prasarana	8 unit	87.145.600	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Semua Kab/Kota,	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	3 Buah	6.250.000	

	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan layanan operasional kantor	12 Bulan	110.750.100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			110.779.200,	
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 1000 surat	6.600.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	6,580,250	
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	70,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	70,000,000	
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	20,500,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan 12 Bulan	20,500,000	
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.650.100	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan 12 Bulan	13.699.200	

		Kelurahan					Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	249.116.550	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			192.834.850	
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 unit	219.116.550	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit 31 kend	169.331.850	
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	1 Unit	10,000,000	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	6 Unit	13.503.000	
B	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Prosentase RLH bagi korban bencana / terdampak program pemerintah	100%	200.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,		100%	100.000.000	

		Semua Kelurahan					Semua Kelurahan				
VIII	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			200.000.000						
22	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 dokumen	65.000.000						
23	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	135.000.00						
IX	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani	10 unit rumah	162.500.000	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100%	100.000.000	
24	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 unit rumah	162.500.000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	100.000.000	
C	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Semua Kab/Kota,	Prosentase Luasan Kawasan Kumuh	62,50%	4.030.000.000	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Semua Kab/Kota,			5.333.418.073	

		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	yang tertangani				Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
X	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kawasan Kumuh yang tertangani	68,36%	4.030.000.000	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			105.000.000	
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	9 Laporan	3.875.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Luas kawasan kumuh yang tertangani	68,90%	105.000.000	
26	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	2 dokumen	155.000.000						
X	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	20%	2.397.500.000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5.228.418.073	
27	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani	231 Unit rumah	2.397.500.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Hun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1000 Unit Rumah	5.228.418.073	

		Semua Kelurahan					Semua Kelurahan				
D	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	78%	4.634.090.500	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		81%	2.637.000.000	
XI	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase kualitas sarana prasarana infrastruktur yang tertangani	78%	4.634.090.500	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2.637.000.000	
28	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	15 lokasi	4.334.090.500	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Luas Taman dalam keadaan baik Jumlah Luas TPU dalam keadaan baik	0 Lokasi 75 %	2.592.000.000	
29	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	25 Laporan	300.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Rekomendasi Rencana Tapak Perumahan yang diterbitkan	0 Laporan 25 buah	45.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					30,000,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				100.000.000	
E	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		Persentase Fasilitas Hak Atas Tanah Program Daerah dan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	75%	30.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kabupaten Batang			100.000.000		
XII	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah permasalahan yang difasilitasi	75%	30.000.000	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah DaerahKabupaten/Kota				100.000.000		
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6 dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah permasalahan yang difasilitasi	0 Dokumen 80 %	100.000.000		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan data dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024 adapun proses penyusunan RKPD Tahun 2024 diawali dari Forum Perangkat Daerah hingga ke Musrenbangda Tahun 2024. Didalam musrenbangda terdapat aspirasi usulan dari para pemangku kepentingan kegiatan masyarakat diantaranya usulan musrenbang dari masing-masing Kecamatan, usulan akselerasi merupakan usulan prioritas dari masing-masing Kecamatan dan usulan reses dari para anggota DPRD Kabupaten Batang. Adapun masing-masing usulan dari para pemangku kegiatan yang masuk di Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang terdiri dari : Usulan usulan Pagu Indikatif Kecamatan sebanyak 0 Paket Pekerjaan dan usulan Reses dari anggota Dewan 63 Paket Pekerjaan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan pembangunan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dan membantu Bupati Batang dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Bahwa proses perencanaan pembangunan daerah dimulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD dan musrenbang kabupaten, dimana sudah mengakomodir usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai lembaga yang melaksanakan pembangunan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berfungsi menampung dan mengakomodir hasil usulan dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kabupaten.

Tabel T-C.32 / Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Batang
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kota, Kecamatan, Kelurahan Batang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Luas kawasan kumuh yang tertangani	0 Laporan 63.00 %	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota, Kecamatan, Kelurahan Batang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Luas kawasan kumuh yang tertangani	0 Laporan 68.90 %	
	Koordinasi dan SinkronisasiPengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota, Kecamatan, Kelurahan Batang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Luas kawasan kumuh yang tertangani	0 Laporan 68.36 %	
1	Perbaikan drainase Jl Re Martadinata Gang Petek Rt 03 Rw 02 Proyonanggan Utara Batang , Kab. Batang	Proyonanggan Utara		1 Paket	Pokir

2	Pembangunan jalan, Jl Yos Sudarso Gang Padi Rt 03 Rw 06 Karangasem Utara Batang , Kab. Batang	Karangasem Utara		1 Paket	Pokir
3	Pembangunan jalan Dukuh Karangsari Rt 01 Rw 07 Kel. Karangasem Utara Batang , Kab. Batang	Karangasem Utara		1 Paket	Pokir
4	Pembangunan Saluran Drainase Jl Yos Sudarso Gang Kapuas Rt 01 Rw 02 Proyonanggan Utara Batang , Kab. Batang	Proyonanggan Utara		1 Paket	Pokir
5	Pavingisasi Dukuh kedungmiri RT.02 RW.02 Kel. Kasepuhan , Kec.Batang, Kab.Batang , Kab. Batang	Kasepuhan		1 Paket	Pokir
6	Pavingisasi Dukuh Pekuncen RT.04 RW.03 Kel. Karangasem Utara, Kec. Batang, Kab.Batang , Kab. Batang	Karangasem Utara		1 Paket	Pokir
7	Pavingisasi Dukuh Pekuncen RT.05 RW.03 Kel.Karangasem Utara, Kec.Batang, Kab.Batang , Kab. Batang	Karangasem Utara		1 Paket	Pokir
8	Pembangunan Rabat Beton Dukuh Sulur RT.04 RW.05 Kel.Karangasem Utara, Kec.Batang, kab.Batang , Kab. Batang	Karangasem Utara		1 Paket	Pokir

9	Pembangunan Rabat Beton Duku Milingan RT.03 RW.01 kel.Karangasem Utara, Kec.Batang, Kab.Batang, Kab. Batang	Karangasem Utara		1 Paket	Pokir
10	Pengaspalan Jalan Duku Kedungrejo RT.04 dan RT.05 RW.05 Kel.Proyonanggan Selatan, Kec. Batang, Kab. Batang, Kab. Batang	Proyonanggan Selatan		1 Paket	Pokir
11	Pengaspalan Jalan Rt 03 Rw 09 Kelurahan Kauman Kec. Batang	Kauman		1 Paket	Pokir
12	Perbaikan Jalan Lingkungan Rt. 02 & Rt. 07 Rw. 08 Duku Seturi Kelurahan Karangasem Utara Kec. Batang	Karangasem Utara		1 Paket	Pokir
13	Perbaikan Jalan Dan Saluran Drainase Lingkungan Rt. 03 Rw. 05 Duku Pabean Kelurahan Karangasem Utara Kec. Batang	Karangasem Utara		1 Paket	Pokir
14	Perbaikan Saluran Drainase Lingkungan Rt. 04 Rw. 01 Duku Milingan Kelurahan Karangasem Utara Kec. Batang	Karangasem Utara		1 Paket	Pokir
15	Perbaikan Jalan Lingkungan Rt. 02 Rw. 09 Perum Wirosari III Kelurahan Sambong Kec. Batang	Sambong		1 Paket	Pokir
16	Perbaikan Saluran Drainase	Proyonanggan Tengah		1 Paket	Pokir

	Lingkungan Rt. 01 Rw. 04 Dukuh Bangunsari Barat Kelurahan Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang				
17	Pembuatan Grill Penutup Drainase Rt. 09 Rw. 05 Gg. Sriti Dukuh Legoksari Kelurahan Proyonanggan Selatang Kecamatan Batang			1 Paket	Pokir
18	Pengaspalan Jalan, Kebon Rojo Rt 02 Rw 01, Kel Kauman Kec Batang			1 Paket	Pokir
19	Pengaspalan Jalan, Kelurahan Kauman Rt 09 Rw 01, Kec Batang			1 Paket	Pokir
20	Pembangunan Paving Jalan, Kel Karangasem Selatan, Pesalakan Rt 04 Rw 01 Kec Batang			1 Paket	Pokir
21	Pengaspalan Jalan, Kelurahan Kauman Rt 04 Rw 10 Kel. Kauman, Kec Batang			1 Paket	Pokir
22	Rabat Beton Jalan, Kelurahan Kasepuhan Rt 01 Rw 01 Kec Batang			1 Paket	Pokir
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kota, Kecamatan, Kelurahan Batang			
	Urusan Penyelenggaraan	Kota, Kecamatan,	Jumlah Lokasi	0 Lokasi 75 %	

	PSU Perumahan	Kelurahan Batang	Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Luas Taman dalam keadaan baik Jumlah Luas TPU dalam keadaan baik		
	<i>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</i>	<i>Kota, Kecamatan, Kelurahan Batang</i>	<i>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Luas Taman dalam keadaan baik Jumlah Luas TPU dalam keadaan baik</i>	<i>0 Lokasi 75 %</i>	
23	<i>Pembangunan Pagar Makam Sijerit Rt.04 Rw.07 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang, Kab. Batang</i>			<i>1 Paket</i>	<i>Pokir</i>
24	<i>Penerangan jalan Dukuh Pekuncen RT.05 RW.02</i>			<i>1 Paket</i>	<i>Pokir</i>

	Kel.Karangasem Utara, Kec.Batang, Kab.Batang , Kab. Batang				
25	Rehab Gapura Gang Mawar Rt. 03 Rw. 07 Dukuh Kutosari Kelurahan Karangasem Utara Kec. Batang			1 Paket	Pokir
26	Rehab Gapura Rt. 03 Rw.03 Dukuh Pekuncen Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang			1 Paket	Pokir
27	Peningkatan Sarana Prasaran Makam Gondang Sari, Kadilangu Rt 03 Rw 08 Kel Kauman Kec Batang			1 Paket	Pokir
28	Pembangunan Gapuro, Kel Proyonanggan Tengah Rt 05 Rw 03 Kec Batang			1 Paket	Pokir
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kota, Kecamatan, Kelurahan Batang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Luas kawasan kumuh yang tertangani		
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota, Kecamatan, Kelurahan Batang	Prosentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Hun	Kota, Kecamatan, Kelurahan Batang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	1000 Unit Rumah	

29	Rehab RTLH 2 Unit atas nama Surip Dukuh Karangjati Rt 09 Rw 03 Desa Kebumen Kec. Tersono dan Suswandi Dukuh Kebumen Rt 01 Rw 01 Desa Kebumen Kec. Tersono			1 Paket	Reses
30	Rehab RTLH Atasnama Juara Dukuh Bonjor Rt 16 Rw 05, Misnah dan Sularno Dukuh Sibobor Rt 08 Rw 02 Desa Sidalang	Dukuh Bonjor Rt 16 Rw 05 dan Dukuh Sibobor Rt 08 Rw 02 Desa Sidalang Kec. Tersono, Kab. Batang		1 Paket	Reses
31	Pemugaran RTLH atasnama Yaidun, Sariman dan Aji Kristiyanto	Rt 08 rw 01, Rt 07 Rw 01 dan Rt 05 Rw 01 Dukuh Pakis Desa Harjowinangun Timur Kec. Tersono, Kab. Batang		1 Paket	Reses
32	Pemugaran RTLH atasnama MUHAMAD KHASAN SIDIQ dan MURNI ASIH	Dukuh Gondo Rt 04 Rw 02 Desa Godo Kec. Tersono Dukuh Gondo Rt 03 Rw 01 Desa Gondo Kec. Tersono , Kab. Batang		1 Paket	Reses
33	Pemugaran RTLH Atasnama Sabar Muhayat	Dukuh Wonokerso Rt 01 Rw 01 Desa Wonokerso Kec. Limpung, Kab. Batang		1 Paket	Reses
34	RTLH Sidayu Muhammad Maskuri RT. 01 RW. 01 Desa Sidayu Kec. Bandar			1 Paket	Reses
35	Pemugaran RTLH Desa Wonokerto 6 Rumah Atasnama HASAN BISRI, AHYAR, DULMUI Rt.003 Rw.002, AMINAH, CASDI Rt.005 Rw.001, dan KUSEN Rt.005			1 Paket	Reses

	<i>Rw.003 Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang</i>				
36	<i>RTLH Wonosegoro 4 Rumah</i>			<i>1 Paket</i>	<i>Reses</i>
37	<i>Pemugaran RTLH 4Unit Rumah</i>	<i>Desa Binangun Kec.Bandar, Kab. Batang</i>		<i>1 Paket</i>	<i>Reses</i>
38	<i>Rtlh Rumah Bapak Waluyo</i>	<i>Jl. Mayjend Sutoyo Rt 01 Rw 04 Desa Denasri Wetan Batang , Kab. Batang</i>		<i>1 Paket</i>	<i>Reses</i>
39	<i>Rtlh Rumah Bapak Siswanto</i>	<i>Jl. Mayjend Sutoyo Rt 01 Rw 04 Desa Denasri Wetan Batang, Kab. Batang</i>		<i>1 Paket</i>	<i>Reses</i>
40	<i>Rtlh Rumah Bapak Sudarno</i>	<i>Rt 01 Rw 03 Desa Denasri Kulon , Kab. Batang</i>		<i>1 Paket</i>	<i>Reses</i>
41	<i>Rtlh Rumah Bapak Sugito</i>	<i>Jl Yos Sudars I Pedalangan Rt 01 Rw 05 Proyonanggan Utara Batang , Kab. Batang</i>		<i>1 Paket</i>	<i>Reses</i>
42	<i>Perbaikan RTLH atas nama Taufik</i>	<i>Dukuh Kertosari RT.05 RW.05 Kel.Kasepuhan, Kec.Batang, Kab.Batang , Kab. Batang</i>		<i>1 Paket</i>	<i>Reses</i>
43	<i>Bantuan Pembangunan RTLH atas nama Amat Amsori</i>	<i>Dukuh Kebanyon RT.04 RW.04 Kel.Kasepuhan, kec.Batang, Kab.Batang , Kab. Batang</i>		<i>1 Paket</i>	<i>Reses</i>
44	<i>Butuh Bantuan Pembangunan RTLH atas nama Yaenal Sidik</i>	<i>Dukuh Kertosari RT.06 RW.05 Kel.Kasepuhan, kec.Batang, Kab.Batang , Kab. Batang</i>		<i>1 Paket</i>	<i>Reses</i>
45	<i>Pemugaran RTLH atas Nama Nafifah RT.01 RW.01 ,Saadi RT.06 RW.02 dan Chokip Mundolip RT.08 RW.03</i>	<i>Desa Kaliboyo Kec.Tulis, Kab. Batang</i>		<i>1 Paket</i>	<i>Reses</i>
46	<i>Pemugaran RTLH Atasnama</i>	<i>Desa Beji RT 02 RW 01</i>		<i>1 Paket</i>	<i>Reses</i>

	<i>Moh Fitoni, Untung Mursid dan Suli'in RT.02 RW.01</i>	<i>Kec.Tulis, Kab. Batang</i>			
47	<i>Pemugaran RTLH Atasnama GIATNO dan SUTRIMO RT.09 RW.03</i>	<i>RT.09 RW.03 Desa Kenconorejo Kec.Tulis, Kab. Batang</i>		<i>1 Paket</i>	<i>Reses</i>
48	<i>Pemugaran RTLH atasnama SUMITO dan WAHADI RT.04 RW.06 , atasnama LILIK ALHUDA RT.01 RW.06 dan KAMBARI RT.03 RW.06</i>	<i>Desa Depok Kec.Kandeman, Kab. Batang</i>		<i>1 Paket</i>	<i>Reses</i>
49	<i>RTLH BAPAK SUGIYONO DUKUH PLUMBUNGAN RT 010 RW 004 DESA SAWAHJOHO KEC WARUNGASEM KAB BATANG</i>	<i>DUKUH PLUMBUNGAN RT 010 RW 004 DESA SAWAHJOHO KEC WARUNGASEM KAB BATANG , Kab. Batang</i>		<i>1 Paket</i>	<i>Reses</i>
50	<i>BANTUAN RTLH BAPAK MUNDIKIR DUKUH PLUMBUNGAN RT 010 RW 004 DESA SAWAHJOHO KEC WARUNGASEM KAB BATANG</i>	<i>RT 010 RW 004 DUKUH PLUMBUNGAN DESA SAWAHJOHO KEC WARUNGASEM KAB BATANG , Kab. Batang</i>		<i>1 Paket</i>	<i>Reses</i>
51	<i>BANTUAN RTLH BAPAK KHODIRIN DESA LEBU RT 001 RW 005 KEC WARUNGASEM KAB BATANG</i>	<i>DESA LEBU RT 001 RW 005 KEC WARUNGASEM KAB BATANG , Kab. Batang</i>		<i>1 Paket</i>	<i>Reses</i>
52	<i>Pemugaran RTLH 6 unit rumah</i>	<i>Desa Wonokerto Kec.Bandar, Kab. Batang</i>		<i>1 Paket</i>	<i>Reses</i>
53	<i>Bantuan RTLH Desa Denasri Wetan</i>	<i>Desa Denasri Wetan Kecamatan Batang, Kab. Batang</i>		<i>1 Paket</i>	<i>Reses</i>
54	<i>Bantuan RTLH Desa Denasri Kulon</i>	<i>Denasri Kulon Kecamatan Batang, Kab. Batang</i>		<i>1 Paket</i>	<i>Reses</i>
55	<i>Bantuan RTLH Kelurahan Kasepuhan</i>	<i>Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang, Kab. Batang</i>		<i>1 Paket</i>	<i>Reses</i>
56	<i>Bantuan RTLH Kelurahan Proyonanggan Utara</i>	<i>Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang,</i>		<i>1 Paket</i>	<i>Reses</i>

		<i>Kab. Batang</i>			
57	<i>Bantuan RTLH Desa Pasekaran</i>	<i>Kelurahan Karangsem Selatan Kecamatan Batang, Kab. Batang</i>		<i>1 Paket</i>	<i>Reses</i>
58	<i>Bantuan RTLH Desa Kalipucang Kulon</i>	<i>Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang, Kab. Batang</i>		<i>1 Paket</i>	<i>Reses</i>
59	<i>Bantuan RTLH Kelurahan Karangasem Selatan</i>	<i>kelurahan Karangasem Selatan Kec. Batang, Kab. Batang</i>		<i>1 Paket</i>	<i>Reses</i>
60	<i>Bantuan rehab rumah (RTLH) NUR ANIMAN, NUR ANIMAN Dk Bandangan Rt 02 Rw 01 Desa Pasekaran Kec. Batang</i>	<i>Dk Bandangan Rt 02 Rw 01 Desa Pasekaran Kec. Batang, Kab. Batang</i>		<i>1 Paket</i>	<i>Reses</i>
61	<i>Bantuan rehab rumah (RTLH) NURKHAELANI, NURKHAELANI, gg gayam mberan rt 03 rw 01 Kel. Watesalit Kec. Batang</i>	<i>gg gayam mberan rt 03 rw 01 Kel. Watesalit Kec. Batang, Kab. Batang</i>		<i>1 Paket</i>	<i>Reses</i>
62					
63					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RPJM Nasional Tahun 2015-2019 merupakan tahap ke-3 pencapaian visi dan misi RPJP Nasional 2025 dengan prioritas agenda pembangunan difokuskan pada pemantapan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan penekanan pada upaya :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Perkembangan kemampuan ilmu dan teknologi; dan
3. Penguatan daya saing perekonomian.

Tantangan eksternal yang dihadapi saat ini antara lain adalah meningkatnya ketidakpastian global terutama terkait harga-harga komoditi seperti bahan pangan, minyak dan gas bumi serta produk-produk ekspor dari hasil pertanian. Kondisi eksternal ini antara lain: Adanya gejolak politik di Timur Tengah ; krisis fiskal di Eropa, walau sudah menunjukkan gejala perbaikan namun efeknya masih tetap ada hingga saat ini; perubahan iklim dengan berbagai cuaca ekstrim; serta bencana alam di berbagai belahan dunia. Untuk mengatasinya perekonomian nasional perlu diperkuat dengan melakukan percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi dan dengan mengelola sumber-sumber secara berkelanjutan.

Tantangan dari lingkungan internal juga perlu mendapat perhatian setimpal. Angka kemiskinan telah berhasil diturunkan dan membaik, jumlah daerah tertinggal yang tersebar di berbagai wilayah masih cukup tinggi. Tantangan internal lainnya adalah kondisi infrastruktur yang belum memadai baik dalam hal ketersediaan, kehandalan, maupun kualitasnya serta efektivitas birokrasi yang belum optimal. Pembangunan nasional pada saat ini jelas masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan, pengangguran serta kesenjangan yang masih luas.

Di samping itu, percepatan pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pada tahun 2012 perlu dijaga agar tidak kehilangan momentum. Strateginya adalah memperluas sumber-sumber pertumbuhan baik dilihat dalam dimensi regional maupun sektoral. Sehingga kata kunci untuk strategi ini adalah perluasan dan percepatan pertumbuhan. Artinya pembangunan nasional (*growth with equity*) harus dapat dijabarkan ke dalam pencapaian pertumbuhan yang lebih tinggi dan menyebar secara luas. Oleh karena itu pembangunan 6 koridor ekonomi menjadi sangat penting untuk mewujudkan hal ini.

Tantangan yang dihadapi di tahun 2024 utamanya masih menyangkut peningkatan kesejahteraan yaitu kemiskinan, pengangguran, dan daerah tertinggal. Untuk mengatasinya perlu dibuka kesempatan kepada seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pertumbuhan ekonomi dengan status yang setara, terlepas dari latar belakang mereka. Namun, kebijakan ini perlu disertai dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat yang lemah dan tertinggal (*affirmative policy*) guna mengurangi kesenjangan kesejahteraan di masyarakat. Sehingga strategi pembangunan yang dipilih adalah pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang perlu diselaraskan dengan tujuan nasional. Pembangunan infrastruktur bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga memperbaiki kualitas permukiman.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) strategic goals yaitu: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan akses infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal; b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja; c) meningkatkan kualitas lingkungan, yang bermaksud untuk mengurangi luas kawasan kumuh, meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman dan meningkatkan pelayanan infrastruktur Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

Penanganan bangunan gedung dan lingkungan telah diupayakan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah melalui kegiatan sosialisasi/diseminasi peraturan bidang bangunan gedung dan lingkungan.

Namun dalam implementasinya masih menemui kendala yakni ketiadaan peraturan yang mengatur pola kerjasama pemerintah dan masyarakat. Faktor lainnya adalah kualitas sumber daya manusia pada lembaga pengelolanya juga masih rendah.

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan pembangunan bidang Perumahan dan Permukiman dan membantu Bupati Batang dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat mewujudkan pembangunan di bidang Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Batang. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan Renstra 2023-2026

Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang 2023-2026 adalah “Terwujudnya sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang layak guna peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam menunjang pembangunan”.

Pembangunan sarana dan prasarana bidang perumahan, permukiman dan pertanahan di Kabupaten Batang mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk pelayanan umum, sarana prasarana penyehatan lingkungan pemukiman serta sarana prasarana perumahan permukiman agar fasilitas umum tersebut dapat dinikmati/ difungsikan oleh masyarakat dengan optimal.

Bidang Perumahan dan Permukiman

Pembangunan perumahan dan permukiman akan mengikutsertakan banyak aspek karena harus dilakukan dalam suatu kerangka perencanaan pembangunan terpadu dengan sektor-sektor lain. Perubahan sosial ekonomi yang dapat membawa dampak berubahnya kondisi perumahan dimana perubahan kebutuhan perumahan dan permukiman tidak pernah menurun sementara disisi lain tidak diikuti dengan bertambahnya persediaan perumahan dan permukiman secara proporsional.

Ketidak proporsional antara permintaan dan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman antara lain adanya kendala keterbatasan lahan, kondisi sosial ekonomi masyarakat serta ancaman perubahan kondisi lingkungan bahkan kecenderungan degradasi lingkungan, berbagai hal tersebut sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius untuk ditangani agar tidak membawa dampak lanjutan yang merugikan berbagai pihak.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran
(1)	(2)	(3)	
Meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengembangan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan	Prosentase Rumah Layak Huni	63,00%
		Prosentase perumahan dan lingkungan permukiman yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik	81,00%
		Persentase pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak	63,00%
		Persentase Pengurangan pemukiman kumuh	63,00%

Meningkatkan pengelolaan administrasi pertanahan	Meningkatnya penyelesaian permasalahan pertanahan	Tingkat penurunan kasus sengketa pertanahan	85,00%
		Persentase penyelesaian kasus pertanahan	100%
	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas DPRKP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM)	65,00%
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66,50%

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang diperlukan suatu instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi.

Rencana program, kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang. Program dan kegiatan Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, indikator program, yaitu:

- Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan
- Persentase capaian kinerja program DPRKP

Terdiri dari kegiatan:

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun, dengan sub kegiatan:
 - a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah laporan keuangan yang disusun dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Pakaian dinas dan ASN yang mengikuti diklat, dengan sub kegiatan:
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c) Penyediaan bahan logistic kantor;
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah dengan sub kegiatan:
 - a) Pengadaan Bangunan Gedung Kantor atau bangunan lainnya;
 - b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan;
 - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya;
 - c) Pemeliharaan/Rehabitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya;

2. Bidang Perumahan dan Pertanahan

- a. Program Pengembangan Perumahan, indikator program, yaitu:
 - Prosentase RLH bagi korban bencana / terdampak program pemerintah;
 Terdiri dari kegiatan:
 - 1) Pembangunan dan Rehaboilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota dengan indicator Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani, dengan sub kegiatan:
 - a) Rehab Rumah Bagi Korban Bencana;
- b. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, indikator program, yaitu:
 - Prosentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum);
 Terdiri dari kegiatan:
 - 1) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dengan indicator Prosentase kualitas sarana prasarana infrastruktur yang tertangani, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian;
 - b) Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan.
- c. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, indikator program, yaitu:
 - Persentase Fasilitasi Hak Atas Tanah Program Daerah dan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan
 Terdiri dari kegiatan:

- 1) Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota dengan indicator jumlah permasalahan yang difasilitasi, dengan sub kegiatan:
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota.

3. Bidang Permukiman

a. Program Kawasan Permukiman, indikator program, yaitu:

- Prosentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani

Terdiri dari kegiatan:

- 1) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dengan indicator Jumlah Kawasan Kumuh yang tertangani, dengan sub Kegiatan
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh
- 2) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dengan indicator Prosentase Rumah Tidak Layak Huni, dengan sub Kegiatan
 - a) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Tahun 2024 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Tahun 2024 memegang peranan yang sangat penting Tahun 2024 menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini, disamping sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, baik eksekutif, legislatif, dunia usaha, kelompok kepentingan, maupun kelompok masyarakat lainnya, juga sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari setiap pelaku pembangunan. Faktor - faktor ini dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi yang makin mantap sehingga hasil pembangunan menjadi optimal.

Dengan demikian, hasil-hasil pembangunan diharapkan dapat merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat, mampu meningkatkan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas yang mantap.

Batang, Juli 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BATANG



EKO WIDIYANTO, SE.MM
NIP. 19660618 199103 1 008